

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	16
1. Spesifikasi Penelitian	17
2. Metode Pendekatan	17
3. Tahap Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Alat Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data	20
7. Lokasi Penelitian	20
8. Jadwal Penelitian	21

BAB II KAJIAN PERPUSTAKAAN MENGENAI PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI PENYADAPAN DAN OPERASI TANGKAP TANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Hukum Acara Pidana	
1. Pengertian Hukum Acara	22
2. Tujuan Hukum Acara Pidana	23
B. Asas-asas Hukum Acara Pidana	25
C. Pembuktian	
1. Pengertian Pembuktian	35
2. Alat Bukti Menurut KUHAP	37
3. Teori Pembuktian	55
D. Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Korupsi	57
2. Korupsi Sebagai Tindak Pidana	59
E. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Komisi Tindak Pidana Korupsi	67

	2. Tugas dan Fungsi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	68
F.	Penyadapan	
	1. Pengertian Penyadapan	70
	2. Pengaturan Penyadapan	71
G.	Oprasi Tangkap Tangan	
	1. Pengertian Operasi Tangkap Tangan	72
	2. Pengaturan Operasi Tangkap Tangan	74
BAB III	KASUS POSISI, PUTUSAN SERTA HASIL PENELITIAN MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN PADA KASUS OPERASI TANGKAP TANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PRAKTEK	
	A. Kasus Posisi dan Putusan	76
	B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.....	90
	C. Pengumpulan Data dan Pengamatan	100
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN PADA KASUS OPERASI TANGKAP TANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	
	A. Pengaturan Terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kasus Korupsi di Indonesia	105
	B. Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan Terhadap Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Peraturan Terkait	109
	C. Penegakan Hukum Dalam Kasus Tidak Pidana Korupsi Berdasarkan Wewenang yang Dimiliki Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.....	114
BAB V	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN	117
	B. SARAN	118
	DAFTAR PUSTAKA	xii